

CATATAN DAN REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2018

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Implementasi dari UU tersebut di atas diwujudkan dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan salah satu faktor pendukung kualitas layanan dasar adalah kualitas pengelolaan keuangan yang harus memenuhi prinsip kepatuhan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta rensponsif.

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi terlaksananya optimisasi penyelenggaraan pelayanan publik.

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.

No	Jenis pendapatan	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan asli Daerah	1.925.549.027.558,0	2.041.096.405.090,93	105,00
1.1	Pajak Daerah	1.657.459.687.185,00	1.717.291.718.438,00	103,61
1.1.1	Pajak kendaraan bermotor	725.000.000.000,00	750.872.115.115,00	103,57
1.1.2	BBNKB	474.000.000.000,00	498.264.771.000,00	105,12
1.1.3	PBBKB	256.000.000.000,00	265.535.612.694,00	103,72
1.1.4	Pajak Air permukaan	354.000.000,00	513.531.844,00	145,07
1.1.5	Palak Rokok	202.105.687.185,00	202.105.687.185,00	100,00
1.2	Hasil Restribusi Daerah	40.772.681.398,00	43.625.223.035,00	107,00
1.2.1	Restribusi jasa umum	12.669.646.000,00	13.103.746.066,16	103,43
1.2.2	Restribusi jasa usaha	27.435.237.998,00	30.136.708.969,00	109,85
1.2.3	Restribusi Perizinan tertentu	667.797.400,00	384.768.000,00	57,62

1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan	85.897.784.674,86	85.097.737.606,37	99,07
1.3.1	PD Tarumartani	800.000.000,00	0	0
1.3.2	Bank Pembangunan Daerah (BPD)	79.201.315.078,00	79.201.315.078,00	100,00
1.3.3	PT AMI	1.089.717.200,00	1.089.717.200,00	100,00
1.3.4	PT Asuransi Bangun Askrida	214.865.140,00	214.865.140,00	100,00
1.3.6	BUKP	4.591.887.256,86	4.951.840.188,57	97,26
1.4	Lain Lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	141.418.874.300,00	195.081.726.011,40	137,95
1.4.1	Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	1.886.533.700,00	2.507.310.047,00	132,91
1.4.2	Penerimaan Jasa giro	11.000.000.000,00	12.974.277.154,00	117,95
1.4.3	Pendapatan Bunga Deposito	20.000.000.000,00	30.750.999.967,84	153,75
1.4.4	Pendapatan atas tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi Daerah	6.660.000,00	15.260.000,00	229,13
1.4.5	Pendapatan Denda atas keterlambatan pekerjaan	00	438.595.654,47	
1.4.6	Pendapatan Denda pajak	42.038.154.450,00	62.117.042.060,00	147,76
1.4.7	Pendapatan Denda Restribusi	2.330.450,00	29.172.830,00	
1.4.8	Pendapatan dari pengembalian	835.211.654,00	1.062.611.141,00	127,23
1.4.9	Hasil pengelolaan dana bergulir	128.124.200,00	255.086.000,00	199,09
1.4.10	Pendapatan dari pengelolaan BLUD	38.188.097.275,00	41.989.877.800,00	109,96
1.4.11	Pendapatan dari pengelolaan BUKP	420.122.731,46	420.360.921,46	100,06
1.4.12	Pendapatan dari pengelolaan barang daerah	6.432.491.250,00	7.043.280.513,00	109,50
1.4.13	Pendapatan denda lain lain	0,00	71.190.000,00	
1.4.14	Pendapatan Tindak lanjut hasil temuan	1.726.915.590,39	8.559.652.027,58	495,66
1.4.15	Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	690.375.000,00	690.375.000,00	100
1.4.16	Pendapatan Lain lain	0,00	71.190.000,00	
2	Dana Perimbangan	2.376.710.501.213,00	2.317.436.811.403,00	97,51
2.1	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	135.665.957.000,00	93.142.565.499,00	68,66
2.1.1	Bagi hasil pajak	130.729.634.000,00	88.194.755.176,00	67,46

2.1.2	Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam	33.269.000,00	44.756.323,00	134,53
2.1.3	Bagi hasil cukai	4.903.054.000,00	4.903.054.000,00	100
2.2	Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000,00	1.314.262.108.053,00	99,99
2.3	Dana Alokasi khusus	926.672.397.213,00	910.032.137.851,00	98,20
2.3.1	Dana Alokasi Khusus fisik	63.233.006.000,00	59.472.825.445,00	94,05
2.3.1.1	Pendidikan	27.352.000.000,00	25.304.240.230,00	92,51
2.3.1.2	Kesehatan	184.717.000,00	166.674.360,00	90,23
2.3.1.3	Jalan	20.037.000.000,00	19.955.456.700,00	99,59
2.3.1.4	Irigasi	5.436.000.000,00	4.534.071.000,00	83,41
2.3.1.5	Kelautan dan perikanan	731.289.000,00	718.331.500,00	98,23
2.3.1.6	Pertanian	3.000.000.000,00	2.797.284.000,00	93,24
2.3.1.7	Kehutanan	3.273.000.000,00	3.148.632.380,00	96,20
2.3.1.8	Energie skala kecil	3.219.000.000,00	2.848.135.275,00	88,48
2.3.2	Dana alokasi khusus non fisik	863.439.391.213,00	850.559.312.406,00	98,51
2.3.2.1	Bantuan Operasional sekolah	607.759.554.000,00	578.172.872.800,00	95,13
2.3.2.2	Dan peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	2.469.565.605,00	2.469.565.605,00	100
2.3.2.3	Dana Pelayanan administrasi kependudukan	1.192,603.001,00	1.192,603.001,00	100
2.3.2.4	Dana tunjangan profesi guru	249.971.828.607,00	266.678.431.000,00	106,68
2.3.2.5	Dan Tambahan Penghasilan Guru	27.900.000,00	27.900.000,00	100
2.3.2.6	Bantuan operasional kesehatan (BOK)	2.017.940.000,00	2.017.940.000,00	100
3	Lain lain pendapatan Daerah yang Sah	1.091.284.5674.226,00	1.085.018.984.579,00	99,43
3.1	Pendapatan Hibah	79.955.500.347,00	73.681.960.000,00	92,15
3.2	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	1.010.685.532.429,00	1.010.685.532.429,00	100
3.2	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah Daerah lainnya	643.531.450,00	651.492.150,00	101,24
	jumlah	5.393.544.092.997,71	5.443.552.201.072,00	100,93

REKOMENDASI.

1. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi,

penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah.

2. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utamadaerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh sebab itu maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.
3. Diharapkan adanya kajian mengenai potensi daerah yang cermat dan akurat yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan pendapatan daerah.

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pada dasarnya belanja pemerintah yang efisien dan efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan, Berapapun besarnya pendapatan akan menjadi kurang bermakna apabila dalam pola belanjanya masih terjadi pemborosan-pemborosan dan tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat..

Pada Umumnya Anggaran belanja disusun secara linear, dengan anggaran tahun sebelumnya sebagai acuan utama. Tidak jarang bahwa peningkatan anggaran pemerintah hanya dirumuskan sebagai suatu peningkatan proporsional dari anggaran tahun berjalan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang nyata.

Dalam belanja daerah tahun 2017 masih banyak kita jumpai komposisi belanja langsung yang diperuntukan pembiayaan belanja aparatur, padahal secara ideal proporsionalitas belanja langsung harus lebih banyak diarahkan untuk belanja publik atau belanya yang dampak dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses belanja daerah harusnya diupayakan tercapainya siklus anggaran yang tepat waktu serta cakupan rencana kerja yang tidak hanya menggambarkan kebijakan umum pemerintah daerah tetapi juga sudah mencakup detail program yang komprehensif termasuk dalam hal estimasi pembiayaannya.

Proses review dari anggaran pemerintah di tingkat legislative (DPRD) diperlukan untuk menguatkan program pengeluaran yang didasarkan atas pelibatan partisipasi masyarakat. Proses politik dalam pembahasan dan penetapan anggaran di tingkat legislatif seyogyanya diarahkan pada pengujian efisiensi yang dapat dilakukan (costs saving) dari setiap anggaran yang diajukan.

Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut OPD DIY Tahun 2018 (Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

NO	OPD	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	1.325.611.569.624,36	1.228.081.180.520,00	92,64
2	Dinas Kesehatan	109.918.613.345,54	102.324.424.366,00	93,09
3	Rumah Sakit Grhasia	48.894.651.493,83	41.062.356.932,00	83,98
4	RS Paru Respira	30.637.683.419,40	24.343.810.788,00	79,46
5	Dinas Pekerjaan umum perumahan dan ESDM	338.951.366.672,86	312.234.297.532,86	92,12
6	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	5.288.683.642,51	4.821.371.567,00	91,16
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.074.221.342,20	8.783.107.370,00	96,79
8	Satuan Polisi Pamong Praja	17.844.046.947,13	17.045.934.359,00	95,53
9	Badan penanggulangan bencana daerah	20.224.803.812,53	18.783.075.076,00	92,87
10	Dinas Sosial	63.325.092.938,80	57.840.770.834,00	91,34
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.921.783.920,60	42.421.058.952,00	94,43
12	Badan pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	34.619.029.568,44	31.853.577.676,00	92,01
13	Badan ketahanan Pangan dan Penyuluhan	12.939.485.450,40	12.026.586.990,00	92,94
14	Badan Lingkungan Hidup	25.778.663.798,80	24.140.245.474,00	93,64
15	Dinas Perhubungan	120.098.990.726,24	112.271.596.765,00	93,48
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	21.588.328.939,80	20.825.533.611,00	96,47

17	Dinas Koprasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah	11.017.206.621,27	10.560.950.960,00	95,86
18	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	8.591.741.253,60	7.952.977.189,00	92,57
19	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	4.426.812.161,00	4.163.051.553,00	94,04
20	Dinas Kebudayaan	15.752.010.081,20	14.591.293.278,00	92,63
21	Badan Perpustakaan Dan Arsip daerah	63.153.520.357,00	61.259.799.417,00	97,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	46.286.942.685,75	42.550.293.957,00	91,93
23	Dinas Pariwisata	32.723.658.993,60	31.634.067.408,00	96,67
24	Dinas Pertanian	54.191.975.087,40	47.809.903.142,00	88,22
25	Badan Penanggulangan Bencana daerah	44.125.036.360,20	41.691.414.066,00	94,48
26	Dinas Perindustrian Dan perdagangan	26.425.067.723,20	25.615.469.174,00	96,94
27	Gubernur Dan Wakil Gubernur	2.685.732.312,40	2.681.403.984,00	99,84
28	Sekretariat Daerah	76.694.137.527,31	70.724.506.760,00	92,22
29	Sekretariat Parampara Praja	1.320.524.003,00	1.157.816.808,00	87,68
30	Kantor Perwakilan Daerah	5.522.915.179,00	5.302.255.662,00	96,00
31	DPRD	28.204.055.000,00	26.406.022.097,00	96,62
32	Sekretariat DPRD	87.449.764.372,40	69.608.450.933,60	79,60
33	Inspektorat	12.480.634.141,38	12.266.323.448,00	98,28
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.772.650.102,40	21.596.979.061,00	90,85
35	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	181.720.877.478,52	171.155.515.391,52	94,19

36	PPKD	1.332.376.881.040,05	1.255.683.610.694,70	94,24
37	Badan Kepegawaian Daerah	147.796.783.985,00	144.622.748.893,00	97,85
38	Badan Pendidikan dan Pelatihan	20.705.930.916,80	19.339.590.400,00	93,05

No	Jenis Belanja	Rencana	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.765.222.803.880,09	2.644.9232.258.179,38	95,65
1.1	Belanja pegawai	1.314.890.942.471,00	1.285.055.475.138,00	97,93
1.2	Belanja Hibah	637.041.930.000,00	587.035.545.684,00	92,15
1.3	Belanja Bantuan Sosial	850.000.000,00	450.000.000,00	52,94
1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	692.463.991.157,38	692.463.991.157,38	100
1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	84.058.646.200,00	79.918.246.200,00	95,07
1.6	Belanja Tidak Terduga	35.917.294.051,71	0	0
2	Belanja langsung	2.950.387.725.255,80	2.658.527.680.642,50	90,11
2.1	Belanja Pegawai	244.544.531.117,00	227.827.624.668,00	93,16
2.2	Belanja Barang & Jasa	1.445.741.174.190,80	1.295.737.439.740,50	89,62
2.3	Belanja Modal	1.260.102.019.948,00	1.134.962.616.234,00	90,07
	JUMLAH	5.715.610.529.135,89	5.303.450.938.821,88	92,79

CATATAN